

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN BANGUN PURBA
KABUPATEN DELI SERDANG**

JULIARNI SIPAYUNG

(090902003)

juliarnisipayung@yahoo.com

Abstrak

Pembangunan yang dilaksanakan di perdesaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, sehingga masih banyak program pembangunan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan objek bukan subjek. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang berkepanjangan di perdesaan pemerintah membentuk program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program simpan pinjam perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai efektifitas program simpan pinjam perempuan. Adapun populasi penelitian ini adalah perempuan sebanyak 80 orang yang mendapatkan pencairan dana pada tahun anggaran 2011 di kecamatan Bangun Purba kabupaten Deli Serdang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel tunggal yang dijelaskan secara kuantitatif dengan menggunakan skala likert.

Berdasarkan analisis data, disimpulkan efektivitas pelaksanaan program simpan pinjam perempuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di kecamatan Bangun Purba adalah efektif dengan nilai skala likert 0,49. Indikator pemahaman program sebanyak 0,45. Ketepatan sasaran sebanyak 0,45. Ketepatan waktu sebanyak 0,59. Tercapainya tujuan sebanyak 0,48. Perubahan nyata dilihat dari mata pencaharian responden yaitu rata-rata beralih menjadi wiraswasta.

Kata kunci: Efektifitas, Program Simpan Pinjam Perempuan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

ABSTRACT

Development that implemented in rural areas still not involve the community, so there are still many rural development programs which are not in accordance with the needs of the community. The community just existence as object of the subject. To reduce Poverty that has been longer, the government has been established programs such as the National Program for Community Empowerment in Rural Areas. This research is to determine the effectiveness of women's savings and loans program the National Program for Community Empowerment in Rural Areas in the district Bangun Purba, regency Deli Serdang.

Type of this research is descriptive that aims to illustrate about effectiveness of women's savings and loans program, the population of this research were 80 womens who get disbursement financial on 2011 in district Bangun Purba, regency Deli Serdang. Analysis technique using a single table which described quantitatively using a likert scale.

Based on the analysis, it was concluded that the effectiveness of women's savings and loans national program for community empowerment program in rural areas in district Bangun Purba. is effective with the likert scale score 0,49. Indicator of program comprehension score is 0,45. Indicator of precision targeting score is 0,45. Indicator of time actually is 0,59. Indicator of goals reaching score is 0,48. Indicator of real charges of respondents emplymment is entrepreneur.

Keywords: Effectiveness, Women's Savings and Loans Program, National Program Community Empowerment in Rural Areas

Pendahuluan

Program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan karena masih ditemui beberapa kelemahan diantaranya peran pemerintah masih sangat dominan dalam pengawasan. Pemerintah Indonesia menyelenggarakan program yang berorientasi khusus pada program pemberdayaan masyarakat, misalnya: PDMDKE (Program Dalam rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi), Padat Karya, P3DT (Program Pengembangan Prasarana Desa

Tertinggal), namun demikian program ini baru berkembang secara sektoral.¹

Pembangunan yang dilaksanakan di perdesaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, sehingga masih banyak program pembangunan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat semestinya tidak hanya dalam tahap pelaksanaan, namun pada tahap perencanaan sampai tahap evaluasi, sehingga menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai objek sasaran program, melainkan sebagai subyek dan objek.

Jumlah penduduk miskin di Sumatera utara pada tahun 2011 sampai pada tahun 2012 berkurang sebanyak 74.060 orang. Selama priode 2011 sampai tahun 2012 penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing berkurang 21.880 orang dan 52.180 orang, pada bulan Maret 2012, penduduk miskin berada di daerah perkotaan sebesar 10,32 persen dan di daerah perdesaan sebesar 11,01 persen.²

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mulai tahun 2007.³ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, akan memberikan pelatihan bagi mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti mencari makan, minum, dan pakaian, setelah kebutuhan dasar terpenuhi baru diberikan modal usaha sesuai yang mereka bisa yang ditentukan oleh rakyat sendiri untuk mewujudkan mimpi mereka.⁴

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan keberlanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan yang dinilai selama ini berhasil. PNPM Mandiri Perdesaan didanai oleh Bantuan Langsung Masyarakat dengan salah satu kegiatan yaitu program simpan pinjam perempuan.⁵ Dengan suku bunga 1% setiap bulan tanpa syarat agunan, dibandingkan dengan Bank yang mencapai 2% setiap bulannya dan memiliki syarat agunan, diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengembangkan usaha mereka.

Seiring dengan pelaksanaan program simpan pinjam perempuan di kecamatan Bangun Purba telah menghadirkan berbagai polemik. Polemik yang muncul terkesan kejar target demi terpakainya seluruh alokasi bantuan langsung masyarakat yang

dikelola di kecamatan. Anggapan kejar target terkadang menjadikan kelompok penerima sebagai objek bukan subyek, kalau ditanyakan kepada kelompok penerimanya, belum tentu mereka membutuhkan karena belum punya usaha yang layak untuk didanai, sebagian masyarakat tidak menggunakan dana pinjaman untuk modal usaha, bahkan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Hal ini dilakukan demi kepentingan pemerintah desa untuk menghapus pemikiran ketidakmampuan desa berpartisipasi dalam program.

Alasan peneliti tertarik meneliti di kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang adalah karena daerah ini merupakan salah satu pelaksana program simpan pinjam perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang terdiri dari 80 anggota simpan pinjam pada tahun anggaran 2011 dari berbagai desa yang ada di kecamatan Bangun Purba

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, peneliti tertarik untuk mengkaji lanjut masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Sejauh mana efektivitas pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang?”. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di kecamatan Bangun Purba kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam rangka: Pengembangan konsep dan teori-teori pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan, pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan dan memperkaya wawasan serta pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat di perdesaan serta menjadi referensi dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di berbagai kecamatan di Indonesia.

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintah bukan saja dalam artian *government* yang hanya menyangkut aparaturnegara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Adanya kebijakan publik yang dibuat pemerintah maka lahirlah kebijakan sosial yang merupakan salah

satu bentuk dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan diantaranya kebijakan sosial dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan bantuan langsung masyarakat. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.⁶

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM-MP adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM-MP merupakan pengembangan dari PPK, yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.³

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan memiliki 4 jenis program kegiatan salah satunya adalah program simpan pinjam perempuan yang merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program Simpan Pinjam Perempuan adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan

pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.⁵

Efektivitas merupakan hasil yang dicapai pekerja dibandingkan jumlah hasil produksi lain dengan jangka waktu tertentu. Kata kunci pengertian ini adalah kata efektif karena pada akhirnya keberhasilan kepemimpinan dan organisasi diukur dengan konsep efektivitas itu sendiri. Efektivitas berarti kuantitas atau kualitas keluaran barang atau jasa.⁷

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.⁸ Dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yang menjadi ukuran dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemahaman program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata.⁹

Metode penelitian

Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan obyek dan fenomena yang diteliti, termasuk didalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada dalam variabel penelitian itu berinteraksi satu sama lain dan apa pula produk interaksi yang berlangsung.¹⁰ Dengan

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena kecamatan Bangun Purba ini merupakan wilayah yang ikut aktif dalam pelaksanaan program simpan pinjam perempuan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sampai tahun 2013 yang mana sebagian masyarakat

dalam pengembangan usahanya dibantu oleh PNPM Mandiri Perdesaan yakni Simpan Pinjam Perempuan.

Populasi dalam penelitian ini adalah 80 orang yang terdiri dari 8 kelompok simpan pinjam perempuan tahun anggaran 2011, yang masing-masing kelompok berjumlah 10 orang. Karena populasi kurang dari 100 maka penelitian ini termasuk penelitian sensus, dimana keseluruhan populasi akan diambil datanya untuk dianalisis.

Data penelitian didapatkan dari hasil pengumpulan jawaban kuesioner, observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian, untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan mentabulasi data yang didapat melalui keterangan responden, kemudian dicari frekuensi dan persentasenya. Setelah itu disusun dalam bentuk tabel tunggal dengan menggunakan skala Likert.

Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kecamatan Bangun Purba, ditemukan bahwa anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan mempunyai usia 23 – 62 tahun. 10 % anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan mempunyai pendidikan diploma/sarjana. Keseluruhan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan memiliki mata pencaharian tambahan maupun mata pencaharian pokok bekerja di bidang non formal yaitu berternak ayam dan babi, bertani seperti karet dan kelapa sawit, dan berdagang kecil-kecilan.

Lama keanggotaan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan yaitu lebih dari 1 tahun. Semua anggota kelompok minimal 1 kali menerima dana pinjaman. Jumlah dana pinjaman anggota kelompok bervariasi sesuai permintaan mereka, dengan rata-rata meminjam 2 juta rupiah.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan peneliti, pemahaman responden tentang program simpan pinjam perempuan, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel I Pemahaman Responden Mengenai Program

No	Pertanyaan	Distribusi pemahaman responden		
		E	KE	TE
1	Sumber pengetahuan responden	25	11	44
2	Pihak pemberi penjelasan	16	24	40
3	Pengenalan terhadap sesama anggota kelompok	80	-	-
4	Frekuensi pertemuan sesama anggota kelompok	60	20	-
5	Topik pembicaraan pertemuan kelompok	10	50	20
6	Kondisi pengelolaan dana simpan pinjam	44	26	10
7	Kondisi kegiatan simpan pinjam	60	16	4
8	Pengetahuan mengenai sumber dana	50	25	5
9	Sikap pelayanan fasilitator	60	20	-
10	Pemahaman mengenai tujuan SPP	62	18	-
11	Pemahaman mengenai penggunaan dana	74	6	-

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan peneliti, pemahaman responden tentang program simpan pinjam perempuan, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel II Ketepatan Sasaran

No	Pertanyaan	Distribusi ketepatan sasaran		
		E	KE	TE
1	Eksistensi kegiatan bersama kelompok	80	-	-
2	Penilaian perencanaan kegiatan bersama	66	14	-
3	Perkembangan kegiatan anggota kelompok	56	24	-
4	Pelaksanaan aturan kelompok	30	35	15
5	Kelancaran iuran	45	25	10
6	Pertanggungjawaban administrasi kelompok	40	35	5
7	Tipe rumah	10	48	22
8	Tempat berobat	30	28	22
9	Status pencatatan keluarga miskin	48	22	10

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan peneliti, ketepatan waktu responden dalam melunasi angsuran pinjaman, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel III Ketepatan Waktu

No	Pertanyaan	Distribusi pemahaman responden		
		E	KE	TE
1	Frekuensi pengelolaan daftar tunggu	60	15	5
2	Pencairan dana	72	8	-
3	Frekuensi mengikuti penyuluhan SPP	62	14	4
4	Frekuensi pertemuan sesama anggota kelompok	50	30	-
5	Ketepatan pelunasan angsuran	-	80	-

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai tercapainya tujuan program simpan pinjam perempuan, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel IV Tercapainya Tujuan

No	Pertanyaan	Distribusi pemahaman responden		
		E	KE	TE
1	Pembantuan pengembangan usaha	68	12	-
2	Kondisi pendapatan bersih	62	18	-
3	Proses administrasi	56	20	4
4	Kegunaan pinjaman	52	24	4
5	Sifat bantuan dana usaha	60	16	4
6	Jumlah modal SPP	64	16	-
7	Kesesuaian dana yang diinginkan	74	6	-
8	Penghasilan rata-rata perbulan sebelum mengikuti program SPP	4	20	56
9	Penghasilan rata-rata perbulan setelah mengikuti program SPP	6	36	38

Analisis

Tahapan pengelolaan kegiatan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan salah satunya adalah melakukan sosialisai baik di desa maupun di antar desa yang memiliki tujuan agar pelaku-pelaku di tingkat desa maupun di kecamatan memahami adanya program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan salah satunya adalah program simpan pinjam perempuan supaya dimanfaatkan serta melakukan proses lanjutan.⁵ masyarakat telah memahami program simpan pinjam perempuan yang di gunakan untuk membantu pendanaan usaha mereka. Hal ini berarti bahwa Program simpan pinjam perempuan di kecamatan Bangun Purba telah disosialisasikan dengan baik. Sosialisasi Program simpan pinjam perempuan ini dikatakan baik, terlihat dari pelayanan fasilitator sebagai pemberian informasi mengenai program yang dapat diperoleh masyarakat secara tepat yang langsung.

Dalam penjelasan petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, ketentuan menjadi kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalah kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.⁵ Sasaran dari pemanfaat program simpan pinjam perempuan efektif karena semua kelompok yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki usaha mengenali semua anggotanya dengan baik sehingga lebih memudahkan anggota kelompok dalam komunikasi dan mendiskusikan apa yang terbaik bagi usaha yang dijalankan. Dalam pengembalian angsuran juga memudahkan pengurus kelompok mengumpulkan angsuran dari tiap-tiap anggota karena pengurus kelompok telah memahami bagaimana situasi dan kondisi anggota kelompok.

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang didalam surat perjanjian pengembalian pinjaman mencakup penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan jangka waktu pinjaman sumber dana bantuan langsung masyarakat maksimal 12 bulan, angsuran langsung dari kelompok ke unit pengelola kegiatan yang ada di kecamatan.⁵ Semua kelompok dapat melunasi pinjaman mereka dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun, karena jika mereka tidak dapat mengembalikan pinjaman dalam waktu lebih 1 tahun maka mereka tidak akan mendapatkan perguliran dana di periode selanjutnya. Penetapan daftar tunggu biasanya menunggu proses verifikasi yang

mencakup persyaratan kelompok, kondisi kegiatan simpan pinjam, penilaian khusus, jumlah rumah tangga miskin dan penilaian kelompok yang membutuhkan waktu yang cukup lama tetapi tidak terlambat

Tujuan program simpan pinjam perempuan adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.⁵ Tujuan program simpan pinjam perempuan tercapai karena responden mendapatkan pendanaan dengan mudah untuk membantu mengembangkan usaha mereka, tetapi jumlah dana yang diterima masih kurang sesuai dengan keinginan responden, hal ini disebabkan dana yang sedikit menurut mereka hanya memenuhi sebagian penambahan modal usaha yang seharusnya dapat digunakan untuk penambahan jumlah ternak serta yang mereka butuhkan lainnya

Perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh pemanfaat program simpan pinjam perempuan yakni ibu-ibu atau wanita yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini memiliki pekerjaan pokok sebagai penjahit dan ada juga yang mulai berdagang dan kini mereka mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari. pada mata pencaharian yang memiliki waktu luang dapat membuka usaha dagang kecil-kecilan setelah mengikuti program simpan pinjam perempuan yang mana responden ini akan memiliki penghasilan yang sisanya dapat ditabung

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman responden terhadap program simpan pinjam perempuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan adalah efektif dengan jumlah rata-rata 0,36 paham tentang simpan pinjam perempuan.
2. Ketepatan sasaran dari program ini adalah: masyarakat miskin, dengan jumlah rata-rata 0,4 efektif
3. Ketepatan waktu program simpan pinjam perempuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan ini efektif dengan jumlah rata-rata 0,41

4. Tercapainya tujuan program simpan pinjam perempuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan efektif mendapat nilai dengan jumlah rata-rata 0,48
5. Perubahan nyata program simpan pinjam perempuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan kurang efektif mendapat nilai dengan jumlah rata-rata 0,29.

Berdasarkan hasil dari kelima kategori (pemahaman program, ketepatan sasaran, tercapainya tujuan dan perubahan nyata) tersebut dapat dilihat dengan nilai rata-rata pelaksanaan program simpan pinjam perempuan adalah kurang efektif. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program simpan pinjam perempuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di kecamatan Bangun Purba adalah efektif dengan nilai 0,388

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pihak kecamatan sebagai pengelola program untuk terus melakukan peningkatan intensitas penyuluhan dan memberikan informasi baik melalui media cetak atau elektronik sehingga masyarakat luas bisa memahami mengenai tujuan program simpan pinjam perempuan
2. Kepada pihak kecamatan sebagai pengelola program lebih cermat lagi untuk terus meningkatkan informasi kepada responden, sehingga memang benar sasaran program simpan pinjam perempuan adalah mereka yang membutuhkan modal usaha. pengelola seharusnya memberikan dana sesuai kebutuhan dan anggota juga seharusnya meminta dan mendapatkan dana sesuai kebutuhan usaha mereka
3. Kepada tim verifikasi dari PNPM MP lebih selektif untuk memilih anggota kelompok SPP, karena masyarakat yang memiliki kekayaan masih mendapat pendanaan modal, seharusnya pendanaan diberikan bagi rumah tangga miskin yang sesuai dengan sasaran dari program ini
4. Disarankan kepada pemerintah setempat agar dapat bekerjasama dalam mendukung pelaksanaan program SPP, karena program SPP bertujuan untuk

membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin) bagi mereka yang memiliki usaha.

5. Disarankan kepada tim verifikasi dan unit pengelola kegiatan program simpan pinjam perempuan agar memberi hak dan kewajiban masyarakat miskin dalam pelaksanaan program SPP agar tercapai tujuan dan terlihat perubahan nyata usaha masyarakat yang mendapat program SPP.

Daftar pustaka

- ¹ [http://www.p2kp.org/warta/files/upp3_kmw4_Harmonisasi_Program_Pemberdayaan,](http://www.p2kp.org/warta/files/upp3_kmw4_Harmonisasi_Program_Pemberdayaan.pdf)
diakses pukul 17.42, 09 Januari 2013
- ² <http://www.bps.go.id>, diakses pada pukul 20.25 WIB, 24 Oktober 2012
- ³ <http://www.pnpmmandiri.or.id> diakses pada pukul 12.25 WIB, 25 Oktober 2012
- ⁴ <http://c.tempo.co/read-Ribu-Desa-di-Indonesia-Miskin> diakses pada pukul 20.35, 08 November 2012
- ⁵ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. *Penjelas PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Direktorat Jendral pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- ⁶ Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- ⁷ Handoko T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Edisi II, Cetakan Keempat Belas, Yogyakarta: BPFE
- ⁸ Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- ⁹ Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- ¹⁰ Siagian, Matias. 2011. *Metode Penelitian Sosial, Pedoman praktis Penelitian Bidang Ilmu Sosial dan Kesehatan*. Medan: Grasindo Monorotama.